

## **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENCEGAH DISKRIMINASI DI SEKOLAH DASAR**

Ika Yatri<sup>1</sup>, Muhammad Azhar Nawawi<sup>2</sup>, Ike Nuryolanda<sup>3</sup>, Fatihatul Ghina  
Masnuriyah<sup>4</sup>, Keisyah Baitul Fatiah<sup>5</sup>, Ahmad Musahhal<sup>6</sup>, Erika Ramadhani Salma<sup>7</sup>  
<sup>1234567</sup>PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat e-mail : <sup>1</sup>[ikayatri@uhamka.ac.id](mailto:ikayatri@uhamka.ac.id), <sup>2</sup>[m.azharnawawi@uhamka.ac.id](mailto:m.azharnawawi@uhamka.ac.id),  
<sup>3</sup>[2201025108@uhamka.ac.id](mailto:2201025108@uhamka.ac.id), <sup>4</sup>[2201025051@uhamka.ac.id](mailto:2201025051@uhamka.ac.id),  
<sup>5</sup>[2201025018@uhamka.ac.id](mailto:2201025018@uhamka.ac.id), <sup>6</sup>[2201025247@uhamka.ac.id](mailto:2201025247@uhamka.ac.id),  
<sup>7</sup>[2201025180@uhamka.ac.id](mailto:2201025180@uhamka.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article discusses the implementation of multicultural education as a strategic effort to prevent discrimination in elementary schools. In the context of Indonesia's multicultural society, schools are expected to serve as safe and inclusive spaces for all students. Through a qualitative study conducted in public elementary schools, it was found that multicultural education is implemented through both learning and personal development activities, such as the integration of tolerance values in lesson plans, classroom discussions, and culture based extracurricular activities. The role of teachers is crucial as facilitators and drivers of change toward an equitable and just environment. However, the implementation of multicultural education faces challenges such as a lack of understanding, stereotypes, and limited teaching materials. Proposed solutions include teacher training, the development of a multicultural curriculum, and the creation of an inclusive school climate. In conclusion, multicultural education must become an integral part of school culture to foster the emergence of a tolerant, open minded, and discrimination-free generation.*

*Keywords: Multicultural Education, Discrimination, Cultural Diversity.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas implementasi pendidikan multikultural sebagai upaya strategis dalam mencegah diskriminasi di sekolah dasar. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, sekolah diharapkan menjadi ruang aman dan inklusif bagi semua siswa. Melalui studi kualitatif di sekolah dasar negeri, ditemukan bahwa pendidikan multikultural diterapkan melalui pembelajaran dan pengembangan diri, seperti integrasi nilai toleransi dalam RPP, diskusi kelas, serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya. Peran guru sangat vital sebagai fasilitator dan penggerak perubahan menuju lingkungan yang setara dan adil. Meski demikian, pelaksanaan pendidikan multikultural menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman, stereotip, dan keterbatasan materi ajar. Solusi yang ditawarkan meliputi pelatihan guru, pengembangan kurikulum multikultural,

serta penciptaan iklim sekolah yang inklusif. Kesimpulannya, pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari budaya sekolah untuk mendorong terciptanya generasi yang toleran, terbuka, dan bebas dari diskriminasi.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Diskriminasi, Keberagaman Budaya.

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Keberagaman kondisi geografis yang dimiliki tiap daerah turut membentuk karakter serta budaya masyarakat yang berbeda-beda. Sebagai negara yang multietnis, Indonesia dihuni oleh ratusan kelompok etnis, masing-masing dengan ciri khas dan identitas budayanya sendiri. Meskipun tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia sangat tinggi, secara moral seluruh elemen bangsa dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Kemajemukan ini tidak hanya dilihat dari banyaknya kelompok etnis, tetapi juga dari ragam budaya yang melekat pada setiap etnis tersebut, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Perbedaan vertikal berkaitan dengan stratifikasi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan,

sedangkan perbedaan horizontal mencakup keragaman dalam bahasa daerah, pakaian adat, rumah tradisional, kuliner, serta simbol-simbol budaya lainnya. Kompleksitas hubungan antar-etnis yang tidak dikelola secara bijaksana, terutama ketika emosi kolektif masyarakat berada dalam kondisi tidak stabil, berpotensi menimbulkan konflik sosial yang bersifat sensitif dan rentan.

Pendidikan keberagaman dan pendidikan multikultural memiliki tujuan utama dalam menanamkan sikap toleransi serta penghormatan antarindividu. Melalui pengajaran nilai-nilai multikultural di lingkungan kelas, peserta didik diharapkan mampu memahami serta menghargai perbedaan latar belakang budaya, agama, dan tradisi sesama mereka (Agustian, 2019).

Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan berbagai bentuk

diskriminasi, terutama yang dialami oleh siswa dari kelompok minoritas. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan mental mereka, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian akademik (Eko Fataip, 2024). Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk diterapkan sebagai upaya strategis dalam meminimalisasi sikap intoleransi dan perilaku diskriminatif di lingkungan sekolah (Nugraha, 2020).

Konsep diskriminasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 1 Ayat (3). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa diskriminasi merupakan segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, asal usul, golongan, status sosial dan ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, maupun pandangan politik. Tindakan diskriminatif ini berpotensi melanggar hak asasi manusia serta menghambat pengakuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak

dasar individu maupun kelompok dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Pendidikan sendiri merupakan suatu proses pengembangan potensi dasar manusia melalui interaksi antara individu dewasa dan anak-anak. Pendidikan dapat berlangsung secara sadar maupun tidak, dan berfungsi sebagai sarana pembentukan manusia yang bermartabat. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor individu, sekaligus membimbing, membina, dan mengarahkan manusia agar terhindar dari ketidaktahuan. Dalam makna yang lebih luas, pendidikan juga dapat dipahami sebagai proses pertumbuhan menuju kedewasaan yang berlangsung secara berkesinambungan, inklusif, adaptif, serta tidak terbatas oleh sekat-sekat tertentu.

Diskriminasi dalam pendidikan terjadi ketika terdapat perlakuan yang membatasi, merendahkan, atau mengucilkan peserta didik lain secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini biasanya dilandasi oleh perbedaan latar belakang agama,

ras, etnis, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Praktik diskriminatif seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan setara bagi semua peserta didik. Terdapat dua jenis bentuk diskriminasi yaitu, diskriminasi secara terang-terangan (eksplisit) dan tersembunyi (implisit). Diskriminasi eksplisit biasanya tampak melalui tindakan seperti ujaran bernuansa rasial atau perlakuan yang tidak adil terhadap siswa dari kelompok minoritas (Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, 2022). Sebaliknya, diskriminasi implisit sering kali terjadi secara lebih halus, misalnya melalui penggunaan bahan ajar yang tidak merepresentasikan keberagaman, atau adanya ekspektasi yang rendah terhadap siswa dengan latar belakang tertentu (Firtikasari, Melsya, 2024).

Akibat dari praktik diskriminatif ini sangat merugikan, antara lain menurunnya kepercayaan diri siswa, rendahnya partisipasi dalam proses pembelajaran, serta prestasi akademik yang ikut terdampak. Lebih

jauh lagi, diskriminasi dapat menciptakan suasana sekolah yang tidak kondusif, penuh ketegangan, dan kurang mendukung perkembangan peserta didik. Hal ini tentu berpengaruh negatif terhadap keseluruhan iklim belajar di sekolah (Yesifa Azovide, 2021).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, undang-undang, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dan pencegahan diskriminasi di sekolah dasar. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur ini kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, temuan-temuan relevan dari penelitian sebelumnya, hambatan yang ada, serta solusi yang diusulkan terkait topik yang dibahas.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

## **1. Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar**

Pendidikan multikultural dianggap sangat penting untuk membentuk karakter siswa agar dapat hidup berdampingan di masyarakat yang beragam. Di tingkat sekolah dasar, konsep-konsep seperti toleransi, saling menghormati, dan pengakuan terhadap perbedaan harus ditanamkan sejak usia dini untuk menghasilkan individu yang inklusif dan demokratis. Studi ini dilaksanakan di sekolah dasar negeri yang memiliki keanekaragaman dalam latar belakang siswa, mencakup aspek agama, suku, budaya, serta status sosial ekonomi. Keberagaman ini mendorong sekolah untuk mengadopsi pendidikan multikultural dalam berbagai kegiatan belajar mengajar.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur Relawati Sarif, Yusinta Dwi Ariyani, dan Andi Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa penerapan pendidikan multikultural terjadi melalui dua pendekatan utama, yaitu dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Dalam proses pembelajaran, guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mencakup tujuan

pengajaran dengan perspektif multikultural, terutama pada mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Metode yang diterapkan mencakup diskusi, ceramah bervariasi, jigsaw, dan pemecahan masalah, semuanya ditujukan untuk membangun sikap saling menghargai di kalangan siswa. Proses belajar mengajar juga dilaksanakan secara demokratis, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengemukakan pendapat dan terlibat aktif tanpa adanya diskriminasi.

Di sisi lain, dalam kegiatan pengembangan diri, nilai-nilai multikultural ditanamkan melalui berbagai aktivitas seperti bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya, serta program rutin yang telah terjadwal. Misalnya, siswa dengan latar belakang agama yang berbeda diajak untuk saling menghormati saat beribadah dan terlibat dalam kegiatan sosial yang memupuk rasa empati dan kebersamaan. Program literasi, peringatan hari-hari nasional, dan penerapan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) juga

menjadi bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai multikultural.

Ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah tersebut, antara lain lingkungan sekolah yang welcoming, kurikulum yang responsif terhadap keragaman, serta fasilitas seperti ruang ibadah dan peralatan seni budaya yang memadai. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural, seperti pola asuh orang tua yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai toleransi, keterbatasan sumber belajar yang mengangkat tema keberagaman, serta kurangnya materi visual seperti poster atau tulisan yang mencerminkan pendekatan multikultural.

Secara keseluruhan, artikel ini menyuguhkan kontribusi yang signifikan untuk memahami cara implementasi pendidikan multikultural dalam konteks sekolah dasar. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penanaman nilai-nilai multikultural perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, konsistensi, dan melibatkan semua elemen di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan multikultural tidak hanya menjadi

bagian dari kurikulum resmi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang hidup sehari-hari siswa, sehingga mereka berkembang menjadi individu yang terbuka, menghargai perbedaan, dan dapat berperan aktif dalam masyarakat yang plural.

## **2. Bentuk-bentuk Diskriminasi di Sekolah Dasar**

Diskriminasi seringkali muncul dari sejarah panjang ketimpangan sistemik, di mana satu kelompok diposisikan lebih tinggi atau lebih rendah dari kelompok lain. Secara mendasar, diskriminasi dapat diartikan sebagai bentuk ketidakadilan atau perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok, didasarkan pada ciri-ciri tertentu seperti suku, jenis kelamin, agama, identitas gender, atau kondisi sosial dan ekonomi. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya diskriminasi, di antaranya adalah stereotip, prasangka, minimnya pemahaman tentang keberagaman, ketimpangan sosial, serta keberadaan budaya atau lingkungan yang secara tidak langsung mendukung sikap diskriminatif. Bahkan dalam beberapa situasi, diskriminasi dapat bersumber dari ketidakadilan yang telah

mengakar kuat dalam sistem sosial masyarakat, sebagaimana disoroti oleh beberapa penelitian (Aasland, 2021; Andrews, 2019; Johnson-Lawrence, 2020; Ramia, 2021; Verdugo, 2023).

Dalam konteks perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah kasus diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Pada periode 2010–2013, KPAI mengidentifikasi setidaknya 15 bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Ini termasuk kasus anak yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran, penolakan masuk sekolah unggulan (RSBI) karena nilai rendah atau kuota penuh, larangan bagi siswa untuk ikut olimpiade akibat tidak memiliki akta lahir, serta adanya perlakuan berbeda berdasarkan status orang tua siswa. Diskriminasi juga terlihat pada kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas, penurunan nilai karena siswa tidak mampu mengikuti les tambahan akibat keterbatasan biaya, atau siswa yang dicap negatif karena merupakan pindahan dari sekolah lain. Kasus lain yang tercatat adalah pengembalian anak dari orang tua pengidap ODHA kepada keluarganya, penolakan

siswa di jurusan pilihan karena tempatnya telah diisi oleh siswa dari keluarga berpengaruh, dan penahanan raport karena tunggakan SPP. Lebih jauh lagi, diskriminasi juga muncul dalam bentuk tidak diberikannya nilai agama bagi penghayat kepercayaan lokal, tidak diperolehnya pendidikan agama sesuai keyakinan karena perbedaan pengelolaan sekolah, siswa yang dicap buruk karena menjadi korban kekerasan seksual, pemberian materi pelajaran yang mengandung bias gender, hingga penolakan atau mempersulit proses pindah sekolah akibat perbedaan keyakinan. (Pratiwi et al., 2024).

Selain diskriminasi, bullying juga merupakan fenomena agresif yang sering terjadi di sekolah. Menurut Veenstra dan koleganya, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Definisi lain dari Djuwita menjelaskan bullying sebagai tindakan paksaan, baik fisik, lisan, maupun psikologis, yang diarahkan untuk melukai korban. Sementara itu, Zakiyah mengartikan bullying sebagai bentuk tekanan atau paksaan dari

satu individu kepada individu lain, dengan posisi korban yang umumnya lebih lemah. Dalam konteks bullying, Salmivalli mengidentifikasi enam jenis peran yang dapat muncul: pelaku utama, teman yang turut membantu pelaku, orang yang mendukung tindakan pelaku, siswa yang membela korban, penonton pasif, dan korban itu sendiri. Adapun bentuk bullying yang paling umum terjadi di sekolah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu bullying fisik (seperti memukul, mencubit, mendorong, menginjak, atau melempar barang), bullying verbal (menggunakan ucapan untuk menyakiti, misalnya mengejek, memberi julukan, mengancam, menyebar gosip, atau meneriaki), dan bullying psikologis (berupa tindakan non-verbal yang berdampak pada kondisi mental, seperti memelototi, mengabaikan, menatap sinis, atau mengucilkan). (Halizah et al., 2024).

### **3. Peran Guru dan Sekolah dalam Mencegah Diskriminasi**

Guru memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya diskriminasi melalui kepemimpinan mereka, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan studi

kasus dalam penelitian ini, guru yang berhasil menerapkan pendidikan multikultural umumnya menggunakan pendekatan pedagogis yang peka terhadap keberagaman budaya (Rasyid, A. Ramli Raffli, 2024). Mereka berupaya memahami latar belakang budaya masing-masing siswa dan mengaitkannya secara langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, salah satu guru di sekolah multikultural memanfaatkan cerita rakyat dari berbagai budaya sebagai materi pembelajaran untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial (Muaz & Ruswandi, 2022). Kepemimpinan guru juga tercermin dari cara mereka membimbing diskusi bertema multikultural di dalam kelas.

Dalam peran ini, guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk memahami perbedaan serta menemukan titik kesamaan di antara mereka. Diskusi ini mencakup isu-isu seperti stereotip, prasangka, dan diskriminasi, yang dibahas dalam konteks yang relevan dengan pengalaman hidup siswa (Windayani, Dewi, Laia, Sriartha, & Mudana, 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan guru yang inklusif

berdampak positif terhadap interaksi antarsiswa. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap saling menghargai, toleransi, dan keterbukaan terhadap pandangan yang beragam, yang pada akhirnya memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka (Mursal Aziz, 2020).

Meski peran utama guru berada di dalam kelas, kontribusi mereka tidak berhenti di situ. Guru juga memainkan peranan penting dalam mendorong perubahan kebijakan sekolah agar menjadi lebih inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, sejumlah guru secara aktif terlibat dalam merancang program-program sekolah, seperti pelatihan tentang keberagaman bagi seluruh staf serta penyusunan kebijakan yang menolak segala bentuk diskriminasi (Amin, 2018). Berikut ini adalah berbagai langkah dan strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan sekolah;

### **1) Melakukan Refleksi Diri**

Guru perlu secara rutin melakukan introspeksi untuk menyadari bias, asumsi, dan pandangan pribadi mereka terhadap siswa. Dengan mengenali dan mengatasi pemikiran yang dapat

menimbulkan prasangka, guru dapat memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua siswa tanpa terkecuali (MI Nor Rahman, n.d. 2024).

### **2) Memahami Keunikan Setiap Siswa**

Setiap peserta didik memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, guru sebaiknya memahami perbedaan tersebut dan berusaha memperlakukan semua siswa dengan adil dan penuh rasa hormat (Furqon, 2020). Ketika guru meluangkan waktu untuk mengenal latar belakang siswa secara mendalam, mereka dapat menghindari prasangka yang muncul karena kurangnya pemahaman terhadap asal-usul siswa (Yusditiyani et al., 2022).

### **3) Menciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif**

Penting bagi guru untuk menciptakan suasana kelas yang ramah dan terbuka bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka. Tanggung jawab guru adalah memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Upaya ini termasuk mendorong interaksi positif antar siswa dari berbagai latar belakang

serta menghargai keberagaman budaya dan bahasa di kelas (Harefa & Lase, 2024).

#### **4) Memberikan Kesempatan yang Setara**

Setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, dinilai secara adil, dan menerima umpan balik yang membangun dari guru. Perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi (Harefa & Lase, 2024). Dengan menjamin kesetaraan dalam kesempatan belajar, guru turut mencegah munculnya diskriminasi di kelas.

#### **5) Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Profesional**

Pelatihan tentang isu keberagaman dan diskriminasi sangat penting bagi para pendidik. Guru yang telah mendapatkan pelatihan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan siswa dari kelompok minoritas dan lebih mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif (Maulindah, Husin, & Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala, 2023). Materi pelatihan mencakup

keterampilan dalam mengelola keberagaman serta kemampuan untuk mengenali dan mengatasi prasangka (Ambarudin, 2016).

#### **4. Hambatan Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar**

Implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman guru tentang konsep multikulturalisme. Meskipun mayoritas guru (80%) di SD Santo Markus 2 Jakarta Timur telah menunjukkan pemahaman yang baik, sebagian kecil (5%) masih merasa kurang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan materi terkait multikulturalisme, dan hanya 59% yang telah mencoba menerapkannya di kelas (Rahmawati et al., 2024). Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai pendidikan multikultural juga teridentifikasi sebagai penghambat yang signifikan (Khaerunnisa et al., 2023).

Hambatan lain yang muncul adalah adanya stereotip dan prasangka yang masih melekat di lingkungan sekolah. Hal ini terlihat dari adanya perdebatan antar siswa

yang dipicu oleh perbedaan (Pane et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh krisis moral, etika, dan toleransi di Indonesia, yang seringkali memicu kasus kenakalan remaja, tawuran, dan bullying, sebagian besar berakar pada kurangnya pemahaman akan keberagaman budaya. Konflik dan kekerasan yang timbul dari keberagaman tersebut menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan (Khaerunnisa et al., 2023).

Minimnya pelatihan pendidikan inklusif juga menjadi kendala. Data menunjukkan bahwa 40% guru merasa kurang mendapatkan pelatihan atau bimbingan terkait implementasi pembelajaran multikultural (Rahmawati et al., 2024). Kurangnya sumber daya guru yang terlatih dalam pendidikan multikultural juga menjadi faktor penghambat (Pane et al., 2024). Hambatan berikutnya adalah ketidaksiapan kurikulum dan materi ajar. Kurikulum yang ada saat ini seringkali belum menyediakan ruang yang memadai untuk eksplorasi dan diskusi mengenai keberagaman budaya. Buku teks dan materi ajar cenderung bersifat monokultural, yang menghambat siswa dalam

menghargai dan memahami keberagaman. Sebanyak 60% guru mengakui kesulitan dalam menemukan bahan ajar yang relevan sebagai hambatan utama (Rahmawati et al., 2024), dan kurangnya media pembelajaran serta kompetensi guru dalam pemanfaatan media juga sangat berpengaruh pada upaya penerapan pendidikan multikultural (Khaerunnisa et al., 2023).

#### **5. Solusi Mengatasi Hambatan Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai solusi dapat diterapkan. Pelatihan guru secara berkala mengenai pendidikan multikultural sangat krusial. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang lebih intensif dan penyediaan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks multikultural sangat disarankan (Rahmawati et al., 2024). Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai standar, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali, menghargai perbedaan

individu, dan menyampaikan materi yang inklusif (Nurbayani, 2022 dalam Pane et al., 2024).

Selain itu, pengembangan bahan ajar berbasis keberagaman juga menjadi solusi penting. Mayoritas guru (68%) menyarankan pengintegrasian materi multikultural secara eksplisit ke dalam kurikulum (Rahmawati et al., 2024). Pengembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai multikultural telah mendapatkan perhatian signifikan (Darmaningtyas, 2021 dalam Pane et al., 2024). Guru juga mengusulkan agar sekolah menyediakan lebih banyak bahan ajar dan media pembelajaran yang berkaitan dengan keberagaman budaya (Rahmawati et al., 2024).

Penguatan budaya sekolah yang inklusif dan terbuka juga merupakan solusi fundamental. Sekolah harus membangun iklim yang mendukung penerimaan terhadap segala perbedaan, mendorong sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi, dengan mengedepankan rasa kekeluargaan di antara seluruh warga sekolah (Khaerunnisa et al., 2023). Pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler yang

berorientasi pada keberagaman juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri. Lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman adalah kunci implementasi pendidikan multikultural, termasuk pembentukan kelompok belajar heterogen, penyediaan sumber belajar dan buku yang mencerminkan keragaman budaya, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mengedepankan multikulturalisme (Pane et al., 2024). Terakhir, mendorong evaluasi dan refleksi diri dari guru dan siswa mengenai sikap terhadap perbedaan sangat diperlukan. Guru memiliki peran penting dalam menilai apakah sikap dan pemahaman peserta didik sudah sejalan dengan nilai-nilai multikultural, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi dan pembinaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai ini secara efektif.

## **E. Kesimpulan**

Implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mencegah diskriminasi serta membentuk karakter siswa yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Melalui

pendekatan pembelajaran dan pengembangan diri, nilai-nilai multikultural ditanamkan secara sistematis dengan melibatkan seluruh elemen sekolah, termasuk guru sebagai agen utama perubahan. Pendidikan multikultural terbukti mampu mengurangi perilaku diskriminatif, meningkatkan kesadaran siswa akan keberagaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara.

Meskipun demikian, penerapan pendidikan multikultural masih menghadapi berbagai hambatan seperti minimnya pemahaman guru, keterbatasan materi ajar, dan kurangnya pelatihan. Solusi yang disarankan mencakup pelatihan intensif bagi guru, pengembangan kurikulum berbasis keberagaman, penyediaan media pembelajaran inklusif, serta penguatan budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi harus menjadi budaya hidup dalam lingkungan sekolah untuk menghasilkan generasi yang demokratis dan menghargai keberagaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Halizah, O. F., Haya Karin, N., Maharani, R. A., & Marini, A. (2024).

<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH> ANALISIS PERAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MENGURANGI DISKRIMINASI DAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR. In JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora (Vol. 3, Issue 9). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>

Khaerunnisa, U., Darmiyanti, A., & Ferianto, F. (2023). Penerapan Pendidikan Multikultural pada Sekolah Dasar. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i1.705>

Pane, A. R., Ritonga, M., Yunita, S., & Ndonga, J. (2024). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(2), 1481–1491.

Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awalina, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.270>

Rahmawati, M. C., Maksum, A., & Nurhasanah, N. (2024). PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH

DASAR. Jurnal Ilmiah Pendidikan  
Dasar, 09(4), 252–262.